



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**



DINAS SOSIAL

JLN. BALAI KOTA NO. 1 ENTROP JAYAPURA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat, Hidayat dan KaruniaNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Dinas Sosial Kota Jayapura untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota dan seluruh stakeholder serta warga masyarakat atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan pendapat yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan pelaksanaannya di waktu-waktu mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang singkat dan sederhana ini dapat diterima oleh pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sekian dan terimakasih semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam berbagai aktifitas.

Jayapura, 14 Januari 2026

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAYAPURA**



**MATHUS PAWARA, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710817 199403 1 016**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	2
1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Program dan Kegiatan	24
2.3. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Pengukuran Kinerja	29
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	32
BAB IV P E N U T U P	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	68
- Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
- Dokumentasi Kegiatan	

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 menggambarkan pencapaian kinerja selama Tahun 2025.

Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Jayapura melaksanakan Program Kerja yang dijabarkan dalam 10 Sub Kegiatan dengan Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja yang berbeda.

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu :

- a. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 3.651.162.000,-
- b. Anggaran Belanja Langsung Rp. 9.509.653.400,-

Hasil yang diperoleh dari gabungan Pencapaian Sasaran yang ditetapkan dengan telah terlaksana adalah :

I. Anggaran Belanja Tidak Langsung :

Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Jayapura memperoleh Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 3.651.162.000,-** yang terdiri dari :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.651.162.000,-

Dari jumlah anggaran tersebut di atas selama Tahun Anggaran 2025 terealisasi mencapai **90,21%**.

II. Anggaran Belanja Langsung :

Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Jayapura memperoleh alokasi belanja **Rp. 7.924.558.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjumlah Rp. 565.750.400,- terealisasi 98,73 %
- 2. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 1.870.708.000,- terealisasi 99,74 %
- 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 6.686.581.000,- terealisasi 99,98 %
- 4. Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 386.614.000,- terealisasi 99,71%

Dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa permasalahan baik secara internal maupun eksternal yang merupakan *kendala* antara lain :

- a. Masih rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- b. Program atau kegiatan Pengentasan Kemiskinan belum terintegrasi dengan SKPD terkait sehingga penanganannya belum maksimal;
- c. Koordinasi antara Instansi Teknis terkait dalam penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosial terlaksana secara maksimal;
- d. Keinginan masyarakat terhadap bantuan dan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Jayapura lebih tinggi dari anggaran yang tersedia;
- e. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Yayasan, Mitra dan Stackholder lainnya belum maksimal.

Disadari bersama bahwa tugas dan fungsi yang diemban Pemerintah Kota Jayapura cukup rumit, namun Dinas Sosial Kota Jayapura selalu berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Tugas Pokok dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Jayapura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jayapura, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah, telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2016, salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial adalah Dinas Sosial Kota Jayapura.

Dinas Sosial di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008, Tanggal 05 Juni 2008 tentang *Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jayapura*.

A. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jayapura

Sesuai dengan Peraturan Daerah di atas maka struktur organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura membawahi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang, antara lain :

1. **Sekretaris**, membawahi 2 Kepala Sub Bagian :
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**, membawahi 3 seksi :
 - Seksi Pemberdayaan Sosial & LK3
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Lanjut Usia
 - Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
3. **Kepala Bidang Bantuan Sosial**, membawahi 3 seksi :
 - Seksi Bantuan Bencana Sosial / Alam
 - Seksi Perlindungan & Jaminan Sosial
 - Seksi Penanganan Korban Tindak Kekerasan
4. **Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, membawahi 3 seksi :
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat & Tuna Susila
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba & ODHA
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan

Adapun bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Jayapura sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut :





Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jayapura*, Dinas Sosial Kota Jayapura mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Bidang Sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial kota Jayapura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan usaha lainnya dalam penanganan masalah sosial;
- c. Pengawasan, pengendalian masalah sosial.

B. Uraian Tugas :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas – Dinas maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial* adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Sekertariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan dan laporan dinas.
 - a) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekertariat mempunyai fungsi :
 - ♦ Pengelolaan urusan administrasi umum ;
 - ♦ Pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - ♦ Pengelolaan urusan keuangan dan asset ;
 - ♦ Pengelolaan urusan perlengkapan ;
 - ♦ Pengelolaan perencanaan dan pelaporan dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, peralatan, dan perlengkapan kantor serta pengelolaan kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan asset meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset serta monitoring dan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembinaan, serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan social di bidang



pemberdayaan penyandang masalah sosial, pemberdayaan peran keluarga lanjut usia, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- ♦ Pembinaan, bimbingan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial;
- ♦ Pemberdayaan peran keluarga lanjut usia, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan LK3 mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah sosial.
- 3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Lanjut Usia mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan pemberian bantuan sosial serta memberikan perlindungan khusus kepada keluarga lanjut usia.
- 4) Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan program kerja masing-masing potensi kesejahteraan sosial, melaksanakan pembinaan, pelatihan serta penguatan bagi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah sosial.

c. Bidang Bantuan Sosial

- 1) Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan data fakir miskin, bencana alam serta korban tindak kekerasan.
 - a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
 - ♦ Pengkoordinasian data korban Bencana Alam dan bencana sosial, jaminan sosial fakir miskin dan korban tindak kekerasan;
 - ♦ Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat.
- 2) Seksi Bencana Alam / Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan data korban, melaksanakan evakuasi dan perlindungan korban bencana alam dan sosial.



- 3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan fakir miskin serta usaha kesejahteraan sosial bagi janda pejuang dan perintis kemerdekaan.
- 4) Seksi Penanganan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas memberikan fasilitas rehabilitasi psikososial dan reintegrasi serta perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

- 1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial, panti, tuna sosial, anak jalanan, korban penyalahgunaan narkoba, mantan narapidana dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi ;
 - ♦ Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, panti, panti, tuna sosial, anak nakal, korban penyalahgunaan narkoba ;
 - ♦ Pembinaan mantan narapidana, dan
 - ♦ Pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat
- 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial mempunyai tugas mengadakan registrasi, identifikasi serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial melalui panti dan non panti.
- 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba dan ODHA mempunyai tugas mengadakan registrasi, serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi korban narkoba melalui panti dan non panti.
- 4) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan mempunyai tugas mengadakan registrasi, identifikasi serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan melalui panti dan non panti.

C. Gambaran Umum Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kab/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;



- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

D. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Jayapura sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang Tingkat Pendidikan Formal, Kepangkatan dan Jabatan. Data Pegawai Dinas Sosial Kota Jayapura 31 Desember 2025

Tabel
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada
Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	S2	1 Orang
3	Kepala Bidang Bantuan Sosial	S1	1 Orang
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S1	1 Orang
6	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	S1	1 Orang
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1	1 Orang
8	Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial	S1	1 Orang
9	Kasie Bencana Sosial/Alam	S1	1 Orang
10	Kasie Penanganan Korban Tindak Kekerasan	S2	1 Orang
11	Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan	S1	1 Orang
12	Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkotika dan ODHA	-	-
13	Kasie Paca Tuna Susila	S2	1 Orang
14	Kasie Pemberdayaan Sosial Masyarakat	S1	1 Orang
15	Kasie Pemberdayaan Keluarga dan Lansia	S1	1 Orang
16	Kasie Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan LK3	S1	1 Orang



17	Pelaksana	S2	1 Orang
		S1	10 Orang
		SMA	4 Orang
18	CPNS	S1	2 Orang
		SMA	5 Orang
19	P3K		8 Orang
Jumlah			45 Orang

Tabel
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Jayapura Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	23
3	Golongan II	9
4	Golongan VII	1
5	Golongan V	7
Jumlah		45

Tabel
Data Pejabat Dinas Sosial Kota Jayapura
Tahun 2025

No	Pejabat Struktural	Jumlah
1	Eselon II b	1 Orang
2	Eselon III a	1 Orang
3	Eselon III b	3 Orang
4	Eselon IV a	10 Orang
Jumlah		15 Orang

E. Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Jayapura, yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025. Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2025, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Jayapura



sebesar Rp.13.160.815.400,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.789.245.854,00 atau 97,18%.

Tabel
Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.695.634.175	3.852.300.919
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.651.162.000	3.293.734.919
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.651.162.000	3.293.734.919
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.060.000	88.060.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.060.000	88.060.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.894.000	318.738.000
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.162.000	85.162.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.410.000	70.410.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.508.000	9.508.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.156.000	3.000.000
5	Penyediaan Bahan/Material	6.596.000	6.596.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	63.650.000	63.650.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.412.000	80.412.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.164.400	84.456.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.760.000	9.096.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.404.400	75.360.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.632.000	67.312.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.902.000	61.582.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.730.000	5.730.000
B	Program Rehabilitasi Sosial	1.870.708.000	1.865.936.435
VI	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.684.464.000	1.679.711.435



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

1	Penyediaan Sandang	293.282.000	293.262.000
2	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	673.459.000	669.812.435
3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	441.864.000	441.619.000
4	Pemberian Layanan Rujukan	275.859.000	275.018.000
VII	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial	186.244.000	186.225.000
1	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA	186.244.000	186.225.000
C	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.686.581.000	6.685.499.500
VIII	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	6.686.581.000	6.685.499.500
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.902.000	438.902.000
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.613.898.000	5.613.008.000
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	633.781.000	633.589.500
D	Program Penanganan Bencana	386.614.000	385.509.000
IX	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten / Kota	386.614.000	385.509.000
1	Penyediaan Makanan	293.282.000	292.177.000
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	93.332.000	93.332.000
	JUMLAH	13.160.815.400	12.789.245.854

1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi Instansi

Melihat dari seluruh Pejabat Eselon (III/b) dan Pejabat Eselon (IV/a) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kota Jayapura maka hampir setengah dari Pejabatnya ada yang tidak mendapatkan kegiatan. Sedangkan sistem kerja kita adalah sistem kerja yang akhirnya dapat dinilai dari kinerja yang dilaksanakan di tahun berjalan sehingga meningkatkan kinerja instansi, terlebih pada Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang memegang kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diakomodir agar dapat meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kinerja OPD. Selain itu harus ada dana yang tersedia di dalam DPA Dinas. Bappeda, BPKAD dan DPR diharapkan untuk tidak mengurangi atau menghilangkan dana anggaran.



Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Dinas Sosial Kota Jayapura dengan penekanan aspek strategis organisasi dan menyajikan permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Jayapura.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jayapura. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jayapura yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Jayapura Nomor **000.7.2.2 / 1629 / 2025** Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Penetapan Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 – 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jayapura dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Jayapura tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Jayapura telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Jayapura merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Jayapura dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sosial Kota Jayapura yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi**1. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura 2025-2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **“TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA MENUJU JAYAPURA EMAS”**

2. Misi

- Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berahlak Dan Sejahtera Dengan Memegang Teguh Nilai–Nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat;
- Misi 2 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- Misi 3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Dan Kelestarian Budaya Lokal;
- Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi;
- Misi 5 Memperkuat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan Untuk Melahirkan Sdm Unggul, Produktif, Dan Berkarakter;
- Misi 6 Mengejewantahkan Daerah Berdasarkan Asta Cita.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Jayapura Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kota Jayapura sebagai berikut :

Tabel 01
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kota Jayapura

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Sakip OPD	77,25	77,25	78,75	79,35	80,43
		Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	60,56	63,78	66,89	70,31	73,64

a. Strategi dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial, maka strategi 2025-2029 yang akan dicapai dengan mengacu tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka strategi Dinas Sosial Kota Jayapura dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- Strategi 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.**
- Strategi 2. Mengembangkan program pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup PPKS.**
- Strategi 3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.**
- Strategi 4. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.**

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan- kebijakan yang dilakukan berdasarkan pada strategi di atas adalah :

- 1. Mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan PPKS.
- 2. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PPKS.
- 3. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.
- 4. Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENUJU JAYAPURA EMAS		
MISI V	:	MEMPERKUAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MELAHIRKAN SDM UNGGUL, PRODUKTIF, DAN BERKARAKTER		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1. Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	1. Mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS	1. Mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan PPKS
			2. Mengembangkan program pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup PPKS	2. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PPKS.
			3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS	3. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS
			4. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial	4. Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yakni Tahun 2025. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2025. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis dan target yang akan dicapai selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target
Dinas Sosial Kota Jayapura
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	293.282.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	180	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	673.459.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	55	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	441.864.000



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	92	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	275.859.000
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	55	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	186.244.000
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	Orang	12.987	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.902.000
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	20	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.613.898.000
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Orang	25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	633.781.000



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jiwa	250	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	293.282.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	9	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	93.332.000
					Total Anggaran			8.943.903.000



D. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Sosial Kota Jayapura menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk Tahun 2025 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 yaitu :



Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jayapura

1.	Instansi	:	Dinas Sosial Kota Jayapura
2.	Visi	:	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Prima Untuk Mewujudkan Masyarakat Kota Jayapura yang Maju, Mandiri, Modern dan Sejahtera
3.	Tugas	:	Dinas Sosial Kota Jayapura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial meliputi Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, asas otonomi dan tugas pembantuan.
4.	Fungsi	:	a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja di bidang Kesejahteraan Sosial. b. Pelaksanaan Koordinasi, Bimbingan, Pembinaan dan Usaha Lainnya dalam Penanganan Masalah Sosial. c. Pengawasan, Pengendalian Masalah Sosial.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun ----- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan bimbingan sosial ----- Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bimbingan sosial	Seksi Paca Tuna Susila Seksi Paca Tuna Susila	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar ----- Jumlah Orang yang seharusnya Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan ----- Jumlah Orang seharusnya Mendapatkan Layanan Rujukan dalam setahun	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial ----- Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang seharusnya mendapatkan bimbingan sosial	Seksi Pelayanan & Rehabilitasi Korban Narkotika & ODHA	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata ----- Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya Didata	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota ----- Jumlah Keluarga yang seharusnya Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga -----	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ----- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Seksi Bencana Sosial / Alam	Kabid Bantuan Sosial
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang seharusnya Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) ----- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan ----- Jumlah Orang yang seharusnya Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabid Bantuan Sosial

2.2 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pada urusan sosial, Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Program dan kegiatan yang terfokus pada upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Program dan kegiatan tersebut, dibagi dalam 2 (dua) jenis Belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang secara tidak langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan dari OPD, yang merupakan Belanja Tidak Langsung yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

Belanja Langsung adalah Belanja yang terkait langsung dengan produktifitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan OPD.

a). Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2025, sesuai Rencana Kerja Anggaran, Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Jayapura adalah seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 8.
Rencana Kerja Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Kota Jayapura

NO.	U R A I A N
	Belanja Gaji dan Tunjangan
1	Belanja Gaji Pokok ASN
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	Belanja Tunjangan Beras ASN
6	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN



	Belanja Tambahan Penghasilan ASN
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

b). Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Belanja Langsung terdiri dari *Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin* dan *Rencana Kerja Belanja Langsung Kegiatan*.

b.1). Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Tahun Anggaran 2025, sesuai Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Kota Jayapura

NO.	U R A I A N
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.	Kegiatan Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	e. Penyediaan Bahan / Material
	f. Fasilitas Kunjungan Tamu
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b.2). Rencana Kerja Belanja Langsung Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Belanja Langsung Kegiatan dibuat setelah dilaksanakannya MUSRENBANG Tingkat Distrik dan Tingkat Kota setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan yang ada di Masyarakat, Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 memprogramkan/ Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.
Rencana Kerja Belanja Langsung Kegiatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Sosial Kota Jayapura

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
	a. Penyediaan Sandang b. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat c. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar d. Pemberian Layanan Rujukan
2.	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL
	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza
B.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
C.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN / KOTA
	a. Penyediaan Makanan b. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 di susun dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025-2029 .

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jayapura. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan target kinerja yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jayapura. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura dengan Walikota Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 06

**Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	- Meningkatnya Standar Hidup Layak	- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- 60 Orang
		- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- 180 Orang
		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- 55 Orang
		- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	- 92 Orang



	- Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	- 55 Orang
	- Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- 12.987 Orang
	- Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota - Aplikasi Pendataan Fakir Miskin	- 25 Keluarga - 1 Paket
	- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- 20 Keluarga - 1 Tahun
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100 Orang
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- 8 Orang

Program/Kegiatan

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.873.000.000,- | PAD & DAU |
| 2. Program Rehabilitasi Sosial | Rp. 1.750.000.000,- | DAU PENDIDIKAN, DAU UMUM & DBH |
| 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp. 5.470.000.000,- | DAU UMUM & OTSUS BG |
| 4. Program Penanganan Bencana | Rp. 400.000.000,- | DAU UMUM & DBH |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Sosial Kota Jayapura dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara

membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dan Realiasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1.1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < ≤ 85	= Berhasil
55 < ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jayapura ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Nomor : 810 / 83 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025-2029 Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Jayapura tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



**SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PELAYANAN PADA PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
OPD PENGAMPU : DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	100%
2	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	100%
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55 Orang; 30 Asrama/ Panti Asuhan	100%
4	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	100%
5	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	100%
6	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12.987 Orang	100%
7	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota	1.871 Keluarga/ Orang; 7 Yayasan/ LKS	100%
8	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25 Orang	100%
9	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100%
10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan KewenanganKabupaten/Kota	9 Orang	100%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 yaitu Meningkatkan pendayagunaan potensi dan sumber- sumber sosial Masyarakat guna mencegah dan menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup dan

kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	100%
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	180 Orang	180 Orang	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55 Orang; 30 Asrama/ Panti Asuhan	55 Orang; 30 Asrama/ Panti Asuhan	100%
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	92 Orang	92 Orang	100%
		jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	55 Orang	55 Orang	100%
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12.987 Orang	12.987 Orang	100%
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25 Keluarga	25 Keluarga	100%
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.871 Keluarga/ Orang; 7 Yayasan/ LKS	1.871 Keluarga/ Orang; 7 Yayasan/ LKS	100%



		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9 Orang	9 Orang	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Jayapura, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 60 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 2) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat target dan realisasinya sebesar 180 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 3) Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 55 Orang dan 30 Asrama/Panti Asuhan. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 4) Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan target dan realisasinya sebesar 92 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan dikategorikan

“Sangat Berhasil” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

- 5) Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA target dan realisasinya sebesar 55 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 6) Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata target dan realisasinya sebesar 12.987 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 7) Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 25 Keluarga. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 9) Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 100 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

- 10) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota target dan realisasinya sebesar 9 Orang. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung adalah :

- a. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Sandang;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - Pemberian Layanan Rujukan.
- b. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA.
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota;
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- d. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Makanan;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 dan di Tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	--	15 Orang	60 Orang	100%
2	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	180 Orang	10 Orang	105 Orang	180 Orang	100%
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang, 30 Asrama / Panti Asuhan	250 Orang, 33 Asrama	100 Orang, 26 Asrama	55 Orang, 30 Asrama / Panti Asuhan	100%
4	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	92 Orang	--	--	92 Orang	100%
5	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	55 Orang	80 Orang	80 Orang	55 Orang	100%
6	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12.987 Orang	--	12.987 Orang	12.987 Orang	100%



7	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25 Orang	32 Orang	20 Orang	25 Keluarga	100%
8	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.871 Orang, 7 Yayasan	100 Orang	100 Orang	1.871 Orang, 7 Yayasan	100%
9	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	275 Orang	100 Orang	100 Orang	100%
10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	10 Orang	9 Orang	9 Orang	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

Di Tahun 2024 dan Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kota Jayapura terdapat perbedaan.

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

- 1) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 60 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 60 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 2) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Tahun 2025 adalah 180 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 180 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.



- 3) Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 55 Orang dan 30 Asrama/ Panti Asuhan. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 55 Orang dan 30 Asrama/ Panti Asuhan. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%
- 4) Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Tahun 2025 adalah 92 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 92 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%
- 5) Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Tahun 2025 adalah 55 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 55 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 6) Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Tahun 2025 adalah 12.987 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 12.987 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 7) Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 25 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 25 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Target pada Indikator

Kinerja Utama pada Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

- 9) Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 100 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 100 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.
- 10) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Target pada Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 9 Orang. Realisasinya di Tahun 2025 sebesar 9 Orang. Realisasi dimaksud, sudah sesuai Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial Kota Jayapura, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori cukup berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	120 Orang
2.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	180 Orang	180 Orang	180 Orang
3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang; 30 Asrama	55 Orang; 30 Asrama	200 Orang
4.	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	92 Orang	92 Orang	72 Orang
5.	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	55 Orang	55 Orang	80 Orang



6.	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12.987 Orang	12.987 Orang	12.987 Orang
7.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	50 Orang
8.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.871 Keluarga/ Orang; 7 Yayasan/LKS	1.871 Keluarga/ Orang; 7 Yayasan/LKS	100 Orang
9.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	250 Orang
10.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	15 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 60 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 60 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota di Tahun 2025 **"Sesuai Target"** dengan pencapaian sebesar 60 Orang



- 2) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 180 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 180 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 180 Orang.
- 3) Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 55 Orang dan 30 Asrama/ Yayasan, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 55 Orang dan 30 Asrama/Yayasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 55 Orang dan 30 Asrama/ Yayasan.
- 4) Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 92 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 92 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 92 Orang.
- 5) Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 55 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 55 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 55 Orang.
- 6) Jumlah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 12.987 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 12.987 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 12.987 Orang

- 7) Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 25 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 25 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 25 Orang.
- 8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS.
- 9) Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 100 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 100 Orang.
- 10) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota, Untuk indikator ini, target di Tahun 2025 yaitu sebesar 9 Orang, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 9 Orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota di Tahun 2025 **“Sesuai Target”** dengan pencapaian sebesar 9 Orang.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jayapura dengan Standar Nasional, tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian Sosial

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jayapura Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan	Tersedianya Pagu Anggaran	1. Dinas Sosial memberikan bantuan sandang bagi Lansia Terlantar, ODGJ, dan Penyandang Disabilitas
2	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan	Meningkatnya Pagu Anggaran	2. Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan penjangkaran dan pemberian bantuan permakanan bagi Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ), Bimbingan Sosial dan Pemberian nutrisi bagi Anak Jalanan, Pelatihan Juru Bahasa Isyarat bagi para pendamping, alat bantu bagi penyandang disabilitas, nutrisi dan alat bantu bagi Lansia serta permakanan bagi gelandangan pengemis.
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan	Tersedianya Pagu Anggaran	3. Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan Bantuan Paket Perlengkapan Sekolah bagi Anak Yatim Piatu, Bantuan Sembako bagi 30 Asrama di Kota



				Jayapura.
4	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Peningkatan	Tersedianya Pagu Anggaran untuk orang yang mendapatkan layanan rujukan	4. Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan Sosialisasi dan Edukasi Upaya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi Siswa siswi SMP di Kota Jayapura dan pemberian bantuan nutrisi bagi ABH.
5	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penurunan	Berkurangnya pagu anggaran, sehingga PMKS yang terlayani kurang	5. Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan bimbingan sosial dan bantuan bahan nutrisi bagi Janda, Duda dan Yatim Piatu dan bantuan peralatan dan perlengkapan tata boga bagi Wanita Rawan Sosial.
6	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	PMKS yang terlayani sama dan sesuai dengan tahun sebelumnya	6. Dinas Sosial melakukan pendataan Masyarakat miskin di Kota Jayapura
7	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Penurunan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan berkurang dengan Perubahan metode bantuan yang lebih maksimal	7. Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan bantuan alat dan bahan penunjang usaha bagi PMKS.
8	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penurunan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berkurang dengan Perubahan metode bantuan	8. Dinas Sosial Kota Jayapura mengadakan Bimbingan dan pemberian bantuan bahan makanan kepada keluarga /anak jalanan dengan harapan keluarga/anak tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal,

			yang lebih maksimal	bantuan kepada Masyarakat berupa sembako dan bingkisan natal serta bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
9	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan	Meningkatnya pelayanan terhadap orang yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	9. Dinas Sosial Kota Jayapura menyediakan tempat pengungsian dan bantuan makanan serta menyiapkan buffer stock bagi korban bencana
10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Sama dengan tahun sebelumnya	10. Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan penguburan yang layak bagi mayat terlantar / tanpa identitas / tidak mampu

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak 60 Orang dan sesuai Target sebanyak 60 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura adalah :

- Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan bantuan sandang bagi Lansia Terlantar, ODGJ, dan Penyandang Disabilitas

- 2) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Tahun 2025 sebanyak 180 Orang dan sesuai Target sebanyak 180 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura adalah :



- Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan penjangkauan dan pemberian bantuan permakanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Bimbingan Sosial dan Pemberian nutrisi bagi Anak Jalanan, Pelatihan Juru Bahasa Isyarat bagi para pendamping, alat bantu bagi penyandang disabilitas, nutrisi dan alat bantu bagi Lansia serta permakanan bagi gelandangan pengemis.
- 3) Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
- Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak 55 Orang, 30 Asrama dan sesuai Target sebanyak 55 Orang, 30 Asrama / Panti Asuhan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura adalah :
- Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan Bantuan Paket Perlengkapan Sekolah bagi Anak Yatim Piatu, dan Bantuan Sembako bagi 30 Asrama / Panti Asuhan di Kota Jayapura.
- 4) Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan
- Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Tahun 2025 sebanyak sebanyak 92 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 92 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura adalah :
- Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan Sosialisasi dan Edukasi Upaya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi Siswa siswi SMP di Kota Jayapura dan pemberian bantuan nutrisi bagi ABH.
- 5) Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Tahun 2025 sebanyak sebanyak 55 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 55 Orang. Adapun



upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura untuk meningkatkan kemandirian hidup PMKS adalah :

- Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan bimbingan sosial dan bantuan bahan nutrisi bagi Janda, Duda dan Yatim Piatu dan bantuan peralatan dan perlengkapan tata boga bagi Wanita Rawan Sosial.

- 6) Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Tahun 2025 sebanyak sebanyak 12.987 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 12.987 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura adalah :

- Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan pendataan Masyarakat miskin di Kota Jayapura.

- 7) Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak sebanyak 25 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 25 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura untuk meningkatkan kemandirian hidup PMKS adalah :

- Dinas Sosial Kota Jayapura memberikan pemberian bantuan alat dan bahan penunjang usaha bagi PMKS.

- 8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak 1.871 Keluarga/Orang, 7 Yayasan/LKS dan sudah sesuai Target sebanyak 1.871 Keluarga/Orang, 7 Yayasan/LKS. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura untuk meningkatkan kualitas SDM mahasiswa adalah :

- Dinas Sosial Kota Jayapura mengadakan Bimbingan dan pemberian bantuan bahan makanan kepada keluarga /anak jalanan dengan harapan keluarga/anak tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal,

bantuan kepada Masyarakat berupa sembako dan bingkisan natal serta bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- 9) Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak 100 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 100 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah :
 - Dinas Sosial Kota Jayapura menyediakan tempat pengungsian dan bantuan makanan serta menyiapkan buffer stock bagi korban bencana.

- 10) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebanyak 9 Orang dan sudah sesuai Target sebanyak 9 Orang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura untuk meningkatkan pelayanan adalah :
 - Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan penguburan yang layak bagi mayat terlantar / tanpa identitas / tidak mampu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025

No	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN				TINGKAT EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%	REALISASI FISIK		
1	Meningkatnya Standar Hidup Layak	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL :	1.870.708.000	1.865.936.435	99,74%	100%	4.771.565	0,26%
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
		1. Penyediaan Sandang	293.282.000	293.262.000	99,99	100%	20.000,00	0,01%
		2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	673.459.000	669.812.435	100	100%	3.646.565	0,54%
		3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	441.864.000	441.619.000	99,94	100%	245.000	0,06%
		4. Pemberian Layanan Rujukan	275.859.000	275.018.000	99,70	100%	841.000	0,30%
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
		1. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	186.244.000	186.225.000	99,99	100%	19.000,00	0,01%



	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.970.000.000	5.969.748.000	100	100%	200.000	0,003%
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.902.000	438.902.000	100	100%	0,00	0,00%
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	633.781.000	633.589.500	99,97	100%	191.500	0,03%
	3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.613.898.000	5.613.008.000	99,98	100%	890.000	0,02%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA : Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	386.614.000	385.509.000	99,71	100%	1.105.000	0,29%
	1. Penyediaan Makanan	293.282.000	292.177.000	99,62	100%	1.105.000	0,38%
	2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	93.332.000	93.332.000	100	100%	0,00	0,00%
	TOTAL	8.943.903.000	8.936.944.935	99,92	100%	6.958.065	0,08%

Dari tabel diuraikan Analisis efesiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan, Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata, Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura. Realisasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 8.936.944.935,00 atau sekitar 99,92% dari Pagu Rp 8.943.903.000,00.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Sandang dengan target output : Jumlah ODGJ, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial berupa pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi sebanyak 60 Orang dan terealisasi sebanyak 60 orang atau 100%.
- 2) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

b) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan target output : Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terjaring dan mendapatkan bantuan sosial berupa nutrisi sebanyak 20 Orang, Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 40 orang, Jumlah anak jalanan yang mendapatkan bantuan sembako/nutrisi sebanyak 100 orang, jumlah Gelandangan pengemis yang mendapatkan permakanan sebanyak 10 Orang, dan Jumlah lansia yang mendapatkan Nutrisi dan Alat Bantu sebanyak 10 orang dan terealisasi sebanyak 180 orang atau 100%.

- 3) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan target output : Jumlah Anak Yatim Piatu yang mendapatkan perlengkapan sekolah sebanyak 55 Orang serta Jumlah Asrama Mahasiswa / Panti Asuhan di Kota Jayapura yang mendapatkan bantuan bahan sembako dan nutrisi sebanyak 30 Asrama/Panti Asuhan dan terealisasi sebanyak 55 orang anak Yapi dan 30 Asrama/Panti Asuhan atau 100%

- 4) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Layanan Rujukan dengan target output : Jumlah Siswa siswa SMP dan Guru BK yang mengikuti Sosialisasi Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan mendapatkan perlengkapan sekolah sebanyak 92 orang jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan bantuan nutrisi sebanyak 10 Orang dan terealisasi sebanyak 102 orang atau 100%

- 5) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

b) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA dengan target output : Jumlah Janda Duda dan Yatim Tidak Mampu yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial berupa nutrisi sebanyak 45 Orang, Jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapatkan Peralatan Penunjang Usaha sebanyak 10 Orang dan terealisasi sebanyak 55 Orang orang atau 100%



- 6) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Darah Kabupaten/Kota dengan target output : Jumlah Masyarakat Miskin yang terdata sebanyak 12.987 Orang dan terealisasi sebanyak 12.987 orang atau 100%
- 7) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Darah Kabupaten/Kota dengan target output : Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat dan bahan penunjang usaha bagi PMKS sebanyak 25 Keluarga dan terealisasi sebanyak 25 Keluarga atau 100%
- 8) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target output : Jumlah keluarga Anak Jalanan yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial berupa Alat dan Bahan Penunjang Usaha sebanyak 20 Keluarga, Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang menerima Bantuan Sembako sebanyak 250 Orang, Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Bingkisan Natal sebanyak 840 Orang, Jumlah Masyarakat yang menerima bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak 761 Orang, Jumlah Yayasan/LKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 7 Yayasan/LKS dan terealisasi sebanyak 1.871 Keluarga/Orang dan 7 Yayasan/LKS atau 100%
- 9) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Penanganan Bencana

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Makanan dengan target output : Jumlah Buffer Stock bahan bantuan bagi korban bencana sebanyak 100 Orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%
- 10) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana realisasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dengan target output : Jumlah Mayat terlantar / Mayat tanpa identitas / mayat tidak mampu



yang mendapatkan pemakaman yang layak sebanyak 9 Orang dan terealisasi sebanyak 9 orang atau 100%

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Program Rehabilitasi Sosial : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan Target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%) Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan Target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%) Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3		Program Penanganan Bencana : Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan Target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%) Indikator Kinerja masuk pada kategori



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

		Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				"Sangat Berhasil"
--	--	---	--	--	--	--------------------------

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 juga menjelaskan :

1. Capaian Indikator Tujuan
2. Capaian Indikator Kinerja Utama
3. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian indikator sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	Sangat Berhasil
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	180 Orang	180 Orang	Sangat Berhasil
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang; 30 Asrama	55 Orang; 30 Asrama	Sangat Berhasil
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	102 Orang	102 Orang	Sangat Berhasil



	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	55 Orang	55 Orang	Sangat Berhasil
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12.987 Orang	12.987 Orang	Sangat Berhasil
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	Sangat Berhasil
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.871 Orang; 7 Yayasan/ LKS	1.871 Orang; 7 Yayasan/ LKS	Sangat Berhasil
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Sangat Berhasil
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	Sangat Berhasil

Capaian realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Jayapura selama 1 Januari s/d 31 Desember sebesar Rp. 12.789.245.854,00 atau 97,18%.

1.2. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

1. Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan meningkatkan pengetahuan mereka lewat pembinaan kepada pengurus Yayasan, pengurus panti asuhan dan pekerja sosial.
2. Meningkatnya pemenuhan hak dasar Masyarakat miskin, tempat tinggal yang layak, air bersih yang cukup, jamban yang layak untuk digunakan dan sarana Pendidikan yang dekat sehingga akses dengan tempat tinggal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Sosial Kota Jayapura Tahun 2025 terhadap masyarakat, pemerintah dan stake holder.

Jayapura, 14 Januari 2026

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAYAPURA**



**MATIUS PAWARA, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710817 199403 1 016**



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN – KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG



2. KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT





3. KEGIATAN PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR

A. BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI ANAK YAPI





B. BANTUAN SEMBAKO BAGI ASRAMA / PANTI ASUHAN



LKSA PELANGI



ASRAMA IPELMAT / WEHALI



ASRAMA PUTRA YAPEN



ASRAMA PUTRA NABIRE



ASRAMA PUTRA KOTA SORONG



ASRAMA PUTRA GIDI YAMO



ASRAMA ASRI NURJAYA KATOLIK PUTRI



ASRAMA PUTRI MAPPI



ASRAMA WAROPEN



ASRAMA KABUPATEN SORONG



ASRAMA PUTRI MARO



ASRAMA PUTRA BOVENDIGUL



ASRAMA PUTRA TELUK WONDAMA



YAYASAN HARAPAN IBU



ASRAMA ANU BETA TUBAT (ABT)



ASRAMA IPEL MAP



ASRAMA PUTRI SARMI KOTA



ASRAMA MAHASISWA PUTRA PUTRI RAJA AMPAT



ASRAMA BINTUNI



ASRAMA PUTRA ASMAT



ASRAMA PUTRI KOTA SORONG



ASRAMA WANINGGO



ASRAMA PUTRI MAHASISWA KARITAS



LKS AIR MATA MAMA



YAYASAN NOKEN PAPUA



YAYASAN HUMANIA



YASIPA



LKS TERANG KASIH BANGSA PAPUA



LKSA KASIH SEJAHTERA



ASRAMA KAIMANA

4. KEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN

A. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA SISWI SMP





B. BANTUAN NUTRISI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)



5. KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA







6. KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA



7. KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN KABUPATEN / KOTA (BANTUAN PENUNJANG EKONOMI PRODUKTIF)



8. KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
A. BANTUAN ALAT DAN BAHAN PENUNJANG USAHA BAGI KELUARGA ANAK
JALANAN



B. BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU





C. BINGKISAN NATAL BAGI MASYARAKAT











9. KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN

DOKUMENTASI BENCANA ALAM LONGSOR DAN PELAYANAN PENANGANAN KORBAN

KODAM LAMA RT.005/RW.005 KELURAHAN NUMBAY DISTRIK JAYAPURA SELATAN TAHUN 2025



DOKUMENTASI KEBAKARAN DAN PELAYANAN TANGGAP DARURAT KORBAN
KAMPUNG BUTON PERUMNAS 2 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM



DOKUMENTASI KEBAKARAN KOMPLEKS MELATI KOTARAJA



10. KEGIATAN PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN (PEMAKAMAN YANG LAYAK BAGI MAYAT TERLANTAR / TANPA IDENTITAS / TIDAK MAMPU)



1. Foto kondisi korban saat di temukan.



3. Foto korban saat di tutup kain oleh masyarakat sebelum di bawa ke rumah sakit.



4. Foto saat petugas medis melihat kondisi korban.











